

BAB I

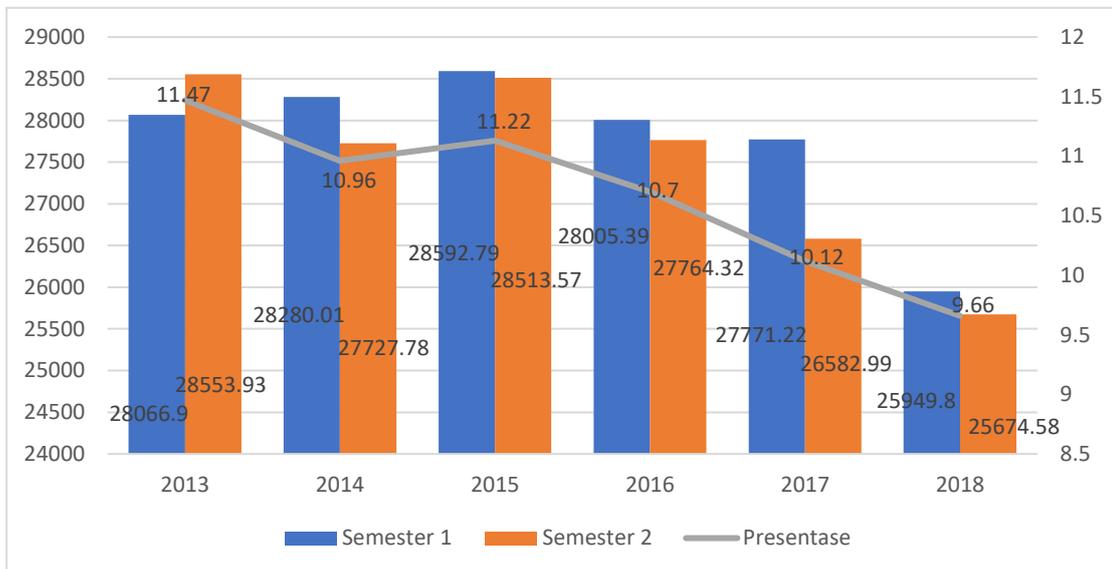
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asean Economic Community (AEC) atau yang sering disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara ASEAN, menekan angka kemiskinan di negara-negara ASEAN, meningkatkan daya saing antar kawasan ASEAN, dan meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Hadirnya *AEC/MEA* mendatangkan beberapa dampak positif maupun negatif. Dampak positif adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yaitu, mampu meningkatkan ekspor sehingga mampu meningkatkan GDP, menciptakan iklim investasi bagi investor asing, dan kesempatan kerja semakin luas. Disisi lain, dampak negatif dari MEA yaitu menjadi suatu ancaman bagi warga negara Indonesia dari segi peningkatan kompetisi, meningkatnya eksploitasi pada sumber daya alam, dan yang tidak kalah penting ialah dari aspek ketenagakerjaan.

Pada aspek ketenagakerjaan memerlukan kompetensi dan kompetisi dalam memenangkan kesempatan kerja namun kenyataannya apabila ditinjau melalui sisi pendidikan maupun produktivitas saat ini, Indonesia masih jauh dari negara-negara lainnya. Permasalahan pada aspek ketenagakerjaan ini memiliki pengaruh pada tingkat kemiskinan. Permasalahan utama perekonomian di Indonesia merupakan kemiskinan dan pengangguran. Dua hal ini tentu saling berkaitan karena faktor utama penyebab kemiskinan adalah pengangguran. Berikut merupakan data kemiskinan yang diakses melalui website Badan Pusat Statistik.

Diagram 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2018



Sumber: bit.ly/JumlahPendudukMiskin dan bit.ly/PersentasePendudukMiskin (diakses pada 25 Mei 2019)

Berdasarkan data kemiskinan yang diakses melalui website Badan Pusat Statistik bahwa tren angka kemiskinan dari tahun 2013 hingga tahun 2018 menunjukkan terus menurun. Tahun 2013 dan tahun 2015 merupakan tahun dimana jumlah kemiskinan di Indonesia yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Di tahun 2013 kemiskinan tertinggi terjadi di semester dua (September) yaitu sebesar 11.47% dan pada tahun 2015 di semester satu (Maret) yaitu sebesar 11.22%. Pada tahun 2018 merupakan sebuah puncak pencapaian pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan sepanjang sejarah karena pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit yaitu dengan persentase 9,66%.

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan sosial ketika sudah masuk ke dalam stratifikasi masyarakat. Kelas stratifikasi sosial yang ada akan menunjukkan adanya kesenjangan sosial seperti adanya kelas-kelas sosial. Faktor adanya kesenjangan sosial dapat dilihat dari masih banyaknya angka pengangguran di

Indonesia yang disebabkan oleh kurang ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja ataupun tenaga kerjanya itu sendiri yang dianggap belum cukup kompeten untuk dapat memenangkan persaingan pasar kerja. Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diakses melalui website Badan Pusat Statistik.

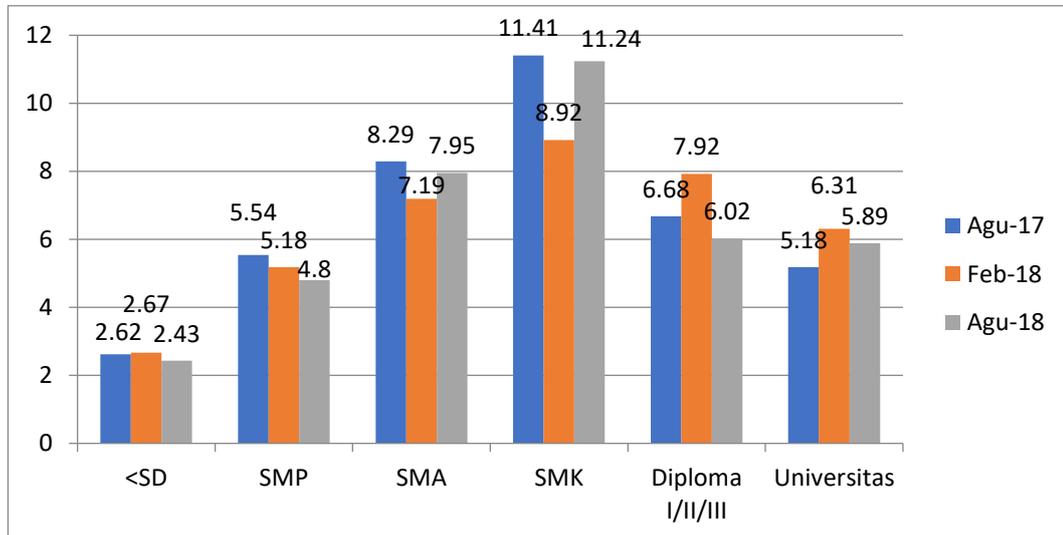
Tabel 1.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2017-Agustus 2018

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Setahun Lalu	Semester Lalu	Saat Ini	Perubahan 1 Tahun		Perubahan 1 Semester	
	Agustus 2017	Februari 2018	Agustus 2018	(Agt 2017–Agt 2018)	(Agt 2017–Agt 2018)	(Feb 2018–Agt 2018)	(Feb 2018–Agt 2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	juta orang			juta orang	persen	juta orang	persen
Penduduk Usia Kerja	192,08	193,55	194,78	2,70	1,41	1,23	0,64
Angkatan Kerja	128,06	133,94	131,01	2,95	2,30	-2,93	-2,19
Bekerja	121,02	127,07	124,01	2,99	2,47	-3,06	-2,41
Pengangguran	7,04	6,87	7,00	-0,04	-0,57	0,13	1,89
Bukan Angkatan Kerja	64,02	59,61	63,77	-0,25	-0,39	4,16	6,98
Sekolah	16,49	15,61	16,53	0,04	0,24	0,92	5,89
Mengurus Rumah Tangga	39,92	36,01	39,65	-0,27	-0,68	3,64	10,11
Lainnya	7,61	7,99	7,59	-0,02	-0,26	-0,40	-5,01
	persen			persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,50	5,13	5,34	-0,16		0,21	
Perkotaan	6,79	6,34	6,45	-0,34		0,11	
Perdesaan	4,01	3,72	4,04	0,03		0,32	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,67	69,20	67,26	0,59		-1,94	
Laki-Laki	82,51	83,01	82,69	0,18		-0,32	
Perempuan	50,89	55,44	51,88	0,99		-3,56	

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (Badan Pusat Statistik RI, 2018, p. 2).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan data pada Agustus tahun 2017 jumlah TPT sebesar 5,50 persen, sedangkan TPT pada Agustus 2018 menurun yaitu menjadi 5,34 persen. Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dapat ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berikut merupakan datanya.

Diagram 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2017-Agustus 2018



Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (Badan Pusat Statistik RI, 2018, p. 3).

Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada segi pendidikan menunjukkan bahwa terdapat penawaran kerja yang belum mampu terserap pada tingkat pendidikan SMA dan SMK. TPT pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat dikatakan lebih unggul daripada tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 11,2 persen. Sedangkan jumlah TPT tertinggi selanjutnya ialah merupakan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 7,95 persen. Para pengangguran yang memiliki pendidikan yang cenderung lebih rendah tidak terlalu memilih-milih pekerjaan yang tersedia. Hal ini didukung oleh data tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yaitu sebesar 2,43 persen. Sedangkan pada tahun 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka hanya meningkat pada tingkat Universitas, sisanya menurun.

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, Warga Negara Indonesia memerlukan modal,

tujuan, dan semangat daya juang untuk memenangkan kesempatan kerja. Modal yang dibutuhkan diantaranya keterampilan, materi, dan tempat tinggal. Keterampilan dibutuhkan karena persaingan yang tinggi menuntut bagi siapapun yang hendak mencari pekerjaan harus memiliki keunikan tersendiri, kemampuan berbahasa, mempunyai keterampilan untuk berwirausaha, kemampuan menguasai teknologi, bahkan kemampuan dalam menguasai beberapa seni. Tidak hanya itu, diperlukan juga modal untuk bertahan hidup seperti untuk tempat tinggal, patuh pada peraturan yang berlaku, dan akomodasi lainnya.

Maju atau mundurnya suatu negara bergantung pada generasi penerus bangsa. Anak merupakan bibit utama generasi penerus bangsa yang harus dijaga maka kesejahteraan anak merupakan hal yang harus diperhatikan demi terciptanya generasi bangsa yang berkualitas. Upaya untuk menciptakan penerus bangsa yang berkualitas maka dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Hal ini, pemerintah dapat menggandeng sektor privat karena kebutuhan pasar lebih banyak dan dapat dikhawatirkan pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan baik.

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan di Indonesia. Anak menjadi korban dari orang tua yang tidak mampu bersaing dalam persaingan pasar kerja sehingga anak tersebut akan memiliki perasaan beban tanggung jawab untuk membantu mencari nafkah. Seorang anak akan berjuang untuk bertahan hidup sebagai bentuk usaha memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Hal ini mengakibatkan seorang anak yang belum memiliki kompetensi untuk melakukan sebuah pekerjaan maka akan memilih untuk mencari

nafkah dengan pergi ke jalan untuk mengemis, meminta-minta, berjualan, ataupun menjadi penyanyi jalanan yang mereka lakukan di lampu merah, perempatan jalanan, atau di tempat-tempat umum lainnya.

Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012 menjelaskan anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk berkegiatan di jalan sehingga anak ini dapat dikatakan anak yang rentan bekerja di jalan ataupun yang bekerja di jalan. Sedangkan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (Setyowati, Yani and Imron, 2018, p. 1) mendefinisikan anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja memperoleh penghasilan di jalan ataupun tempat umum, biasanya berusia 5-18 tahun. Menurut UNICEF (Setyowati, Yani and Imron, 2018, p. 1) anak jalanan merupakan anak-anak yang menjalankan hidupnya nomaden di jalan, berusia di bawah 16 tahun dan hidup jauh dari keluarga mereka, sekolah, hingga lingkungan terdekat mereka. Berbeda lagi menurut *United Nation* (Wahyuni *et al.*, 2018, p. 68) anak jalanan merupakan anak yang menggunakan sebagian besar waktunya melakukan kegiatan-kegiatan di jalan. Penyebab anak jalanan bisa tinggal di jalan disebabkan karena ditelantarkan ataupun dibuang oleh keluarganya yang tidak menyanggupi menanggung beban kehidupan keluarganya karena kemiskinan.

Terdapat empat kategori anak jalanan menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP (Ni'maromah, 2012, pp. 29–32) diantaranya sebagai berikut:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan

Anak yang menggunakan waktunya setiap hari untuk hidup di jalan bahkan mereka perlu mencari tempat yang layak untuk tinggal dan istirahat. Anak jalanan dalam kategori ini tidak mempunyai tempat untuk dijadikan rumah untuk tinggal ataupun istirahat. Terdapat beberapa kriteria pada kategori ini, yaitu; anak yang terputus atau memutuskan hubungan dengan orang tuanya, melakukan kegiatan di jalanan untuk bekerja selama 8-10 jam sehari, tidak lagi sekolah, dan usia di bawah 14 tahun.

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan

Anak yang bekerja di jalan sebagai upaya untuk bertahan hidup. Kategori ini anaknya dapat dikatakan lebih kreatif dan mandiri. Anak dalam kategori ini memiliki karakteristik memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya, sudah mampu mengontrak bersama teman-temannya biasanya berada di daerah kumuh, tidak sekolah, berada selama 8 hingga 16 jam di jalanan.

3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan

Pada kategori ini merupakan anak yang suka bermain dengan temannya yang hidup di jalan sehingga cukup rentan untuk menjadi anak jalanan juga. Anak pada kategori ini memiliki kriteria masih berhubungan dengan keluarganya, masih sekolah, berada di jalanan selama empat hingga lima jam untuk berjualan di jalan.

4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun

Pada kategori ini merupakan anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun dimana sudah dapat dikatakan beranjak dewasa. Anak jalanan pada kategori ini memiliki kriteria memiliki hubungan yang sudah tidak baik dengan orang

tuanya, tidur di jalan ataupun masih di rumah orang tuanya, sudah tamat SD ataupun SLTP namun tidak melanjutkan sekolahnya lagi, bekerja di jalanan selama 8-24 jam.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa anak jalanan merupakan anak yang rentan untuk hidup di jalan ataupun anak yang melakukan sebagian besar kegiatannya di jalanan, dari istirahat hingga bekerja di jalan. Rentang usia anak jalanan kisaran 5-18 tahun. Beberapa anak jalanan masih menjalin hubungan dengan orang tuanya ada pula yang memiliki pola hubungan dengan kedua orang tuanya yang kurang baik. Anak jalanan biasanya hidup nomaden dan mencari tempat yang layak untuk disinggahi untuk tempat mereka beristirahat, biasanya istirahat di tempat-tempat umum seperti Gedung terlantar, kolong jembatan, dan lain sebagainya.

Menurut World Health Organization (2002) menjelaskan terdapat beberapa jenis anak jalanan, diantaranya pertama, *a child of the street*, tidak mempunyai keluarga atau ditelantarkan oleh keluarganya, tidak mempunyai tempat tinggal dan tinggalnya di jalanan atau berpindah-pindah seperti pada gedung yang tidak ditempati. Anak jalanan harus berjuang untuk bertahan hidup. Kedua, *a child on the street*, anak jalanan masih sering pulang ke rumah, bahkan masih pulang setiap malam untuk tidur di rumah, namun mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan karena permasalahan kemiskinan, atau permasalahan seksual atau fisik yang terjadi di rumah. Ketiga, *a part of a street family*, beberapa anak tinggal di pinggir jalan atau di beberapa tempat di kota dengan keluarganya karena kemiskinan, bencana alam, ataupun karena keterpaksaan untuk tinggal di jalan. Mereka hidup nomaden

dengan berpindah-pindah, bahkan mereka bekerja di jalanan dengan anggota keluarganya. Keempat, *in institutionalized care*. Berasal dari situasi tunawisma dan mempunyai resiko untuk kembali lagi seperti kondisi awalnya yang tunawisma.

UNICEF dan Badan Internasional Anak Jalanan (Zarezadeh, 2013, p. 2) mengategorikan anak jalanan ke dalam empat grup berdasarkan status kehidupan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kekurangan rumah dan anak dan tinggal di jalan,
2. Mereka yang memiliki rumah dan keluarga, namun karena satu alasan mereka bercerai dan tinggal pada kelompok kecil dan terkadang,
3. Mereka yang ditahan di pusat khusus, tetapi sebelumnya telah hidup dalam status tunawisma dan mereka diancam untuk kembali ke beberapa situasi
4. Anak-anak yang tinggal dengan keluarganya, namun untuk beberapa alasan, utamanya kemiskinan, mereka menghabiskan beberapa malam dan beberapa jam pada siang hari di jalan.

Anak jalanan yang mencari nafkah di jalan biasanya memiliki keluarga yang miskin dan kurang teredukasi. Hal tersebut memaksa anak untuk turut membantu keluarganya dalam mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi seperti ini menjadi bagian dari budaya yang buruk karena anak-anak akan bertumbuh kembang tanpa adanya pengembangan diri yang baik. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki kompetensi yang cukup baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang baik.

Mencari pekerjaan di Jakarta tidaklah mudah. Banyak orang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari nafkah dengan harapan mampu

memperbaiki kualitas hidup. Mencari pekerjaan di Jakarta membutuhkan kompetensi yang tinggi baik itu keterampilan, kemampuan, serta modal untuk bertahan hidup di Jakarta. Apabila sebagai pendatang atau warga negara Jakarta itu sendiri tidak mampu memenuhi kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan maka akan sulit untuk memenangkan persaingan kerja di Jakarta. Sebagai akibat dari rendahnya kompetensi diri, maka banyak dari mereka yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai contoh, orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya akan cenderung mendorong anaknya untuk turut mencari nafkah untuk keluarga.

Seorang anak yang bekerja menjadi anak jalanan memiliki beban tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya merupakan salah satu faktor yang menjadikan anak tersebut sebagai anak jalanan. Rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang anak untuk bekerja maka mereka tidak mempunyai pilihan lain selain untuk bekerja di jalanan. Terdapat beberapa contoh pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh anak jalan diantaranya ialah menjadi penyanyi jalanan, membersihkan kaca mobil, tukang sulap jalanan, berdagang makanan, pedagang koran, dan lain sebagainya. Berikut merupakan data anak jalanan di Jakarta yang diakses melalui website nasional.republika.co.id dan <https://arc-atmajaya.org>.

Diagram 1. 3 Data Anak Jalanan di Jakarta Tahun 2015-2017



Sumber: bit.ly/BeritaRepublikaRumahSinggah (diakses pada 23 Mei 2019) dan bit.ly/PotretKerentananAnakJalanan (diakses pada 25 Mei 2019).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anak jalanan di Jakarta pada tahun 2015 ialah sebesar 8200, kemudian pada tahun 2016 jumlah anak jalanan sebesar 14808, dan pada tahun 2017 terdapat sebesar 8143. Apabila dilihat dari data tersebut, jumlah anak jalanan di Jakarta cenderung fluktuatif. Keberadaan anak jalanan tidak hanya diakibatkan dari adanya faktor kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari cukup, namun Lewis (1994) menjelaskan meningkatnya angka anak jalanan mengacu pada faktor status keluarga dan kondisi psikologis dari anak tersebut dan persepsi anak jalanan tersebut tentang kehidupan. Menurut Epstein (Dutta, 2018) menjelaskan keberadaan anak jalanan diakibatkan kekerasan, konflik bersenjata, bencana alam, adanya perubahan struktur dalam keluarga sebagai beberapa penyebabnya.

Hidup di jalan merupakan sebuah tantangan untuk bertahan. Anak-anak yang bekerja di jalanan sering kali mendapatkan stigma sebagai anak-anak yang nakal dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum. Tidak hanya itu, anak-

anak yang mencari pekerjaan di jalanan seringkali berhadapan dengan bahaya seperti korban pelecehan seksual, masalah mental dan fisik, bullying, dan lain sebagainya. Para anak jalanan pun mempunyai alasan atas mengapa mereka bisa bekerja di jalanan.

World Health Organization (2002) menyebutkan terdapat beberapa alasan mengapa anak jalanan tinggal di jalan. Sebagian besar anak jalanan pergi ke jalan untuk mencari kehidupan yang lebih baik seperti untuk mencari penghasilan untuk dirinya dan mendukung keluarga, untuk mencari tempat tinggal, untuk menghindari dari keluarga yang bermasalah (termasuk yang diabaikan), adanya permintaan dari keluarganya untuk pergi mencari kerja, pergi dari institusi rehabilitasi karena mereka merasa tidak bebas. Sedangkan permasalahan anak jalanan menurut World Health Organization (2002) ialah anak jalanan memiliki beban yang lebih besar daripada anak miskin lainnya yang diawasi oleh orang dewasa. Permasalahan mereka dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu sosial, fisik, dan psikologis. Berikut merupakan penjelasannya.

1. Permasalahan sosial

Pada permasalahan sosial mereka kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup, adanya diskriminasi dan kesulitan untuk mengakses sumber daya, kekerasan lingkungan, terbentuknya stigma anak jalanan mencari keributan, kekerasan, dan susah diatur.

2. Permasalahan fisik

Kurang memadainya nutrisi yang dibutuhkan, cedera yang disebabkan secara sengaja maupun tidak disengaja, permasalahan seksual dan reproduksi, permasalahan kesehatan.

3. Permasalahan psikologis atau mental

Masa lalu yang penuh tekanan, masa transisi pada gaya hidup, kesehatan mental, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya.

Suyanto (Wahyuni *et al.*, 2018, p. 68) menjelaskan proses anak ke jalanan ialah *pertama* mereka pergi selama sehari atau seminggu kemudian kembali ke rumah, lalu kabur dari rumah lagi selama 2-12 minggu kemudian mereka memutuskan untuk sungguhan kabur dari rumah selama setahun hingga dua tahun. Setelah mereka ke jalan, mereka akan menghadapi proses kedua, yaitu inisiasi. Biasanya mereka akan menjadi objek anak jalanan dewasa. Biasanya barang yang terlihat cukup bagus akan diambil, dan kemudian mereka akan dipukuli oleh sepantaran anak yang sudah tinggal jalanan.

Upaya bertahan anak jalanan mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Pekerjaan yang mereka kerjakan akan mempengaruhi hasil pendapatan mereka. Beberapa profesi yang biasanya dikerjalan oleh anak jalanan merupakan semir sepatu, membersihkan kaca mobil, berjualan koran, berjualan kue, meminta-minta agar dengan harap belas kasihan akan diberikan uang, dan lain sebagainya. Anak jalanan pun ada yang tinggal masih bersama orang tuanya, hingga tinggal berpindah-pindah.

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan regulasi dimana menjelaskan tentang ketertiban umum. Salah satu isi Perda ini yaitu melarang untuk memberikan uang

atau apapun dengan tujuan untuk menekan angka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 40 (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007) (1) setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; (2) menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; (3) membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Salah satu kewajiban pemerintah ialah untuk merawat anak terlantar. Sebagaimana pada (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) pada pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa intervensi untuk menangani permasalahan anak jalanan di Jakarta serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Intervensi yang dilakukan pun bertujuan agar anak jalanan dapat mandiri setelah menerima intervensi yang diberikan serta tidak kembali lagi sebagai anak jalanan.

Intervensi sosial yang dilakukan ialah dengan memberikan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Rehabilitasi sosial berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 1 ayat 15 menjelaskan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Usaha rehabilitatif ini didukung

melalui (Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014) tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pada pada 15 ayat (1) pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, dimaksudkan untuk memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai melalui, (a.) Pelatihan keterampilan, (b.) pelatihan kewirausahaan, (c.) praktek magang kerja; dan/atau (d.) pemberian modal usaha.

Berdasarkan data primer yang diambil melalui wawancara lisan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018, menjelaskan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berupa pemberdayaan rehabilitatif berupa pelatihan keterampilan yang diberikan kepada para anak jalanan melalui panti-panti sosial. Bagi anak jalanan yang dimasukkan ke dalam Panti akan diberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Sebagai contoh, bagi mereka yang mempunyai keterampilan pada memasak maka akan diberikan pelatihan atau kursus tata boga sama halnya bagi para anak jalanan yang mempunyai keterampilan menjadi montir, las, memotong rambut, tata rias, menjahit, maka akan diberi pelatihan yang sesuai dengan keterampilannya.

Berdasarkan wawancara lisan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018 pun menjelaskan upaya Dinas Sosial dalam menunjang untuk memperluas lapangan pekerjaan, Dinas Sosial DKI Jakarta juga bekerja sama dengan negara Korea dalam segi bursa kerja. Korea membantu dalam bidang perbengkelan, TV dan *handphone*, pemotong kayu dengan ukuran tertentu, mengukir kayu, hingga pelayan restoran. Sedangkan beberapa macam bursa kerja

lainnya yang menampung diantaranya, ASTRA Motor, Alfamart, Indomaret, Pegawai KPK, Polisi Tamtama, Pegawai Bank di Mandiri ataupun BRI, Pegawai di Bank Swasta, pelayan di Circle K. Tidak hanya itu, berdasarkan berita yang dikutip melalui [kompasiana.com/dinsosdki](https://www.kompasiana.com/dinsosdki)¹, Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan *Korean International Cooperation Agency* (KOICA) dalam upaya mengatasi remaja bermasalah dengan memberikan penanganan pada remaja yang dibina oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1. Pelatihan keterampilan yang diberikan merupakan untuk menunjang kemandirian remaja tersebut. Terdapat beberapa pelatihan keterampilan, diantaranya otomotif, las, tata rias, tata boga, tata busana, servis AC, komputer, servis handphone, dan *furniture*.

Mengutip melalui [kompasiana.com/dinsosdki](https://www.kompasiana.com/dinsosdki), Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Panti Sosial Bina Remaja yang didukung oleh *Korea International Cooperation Agency* (KOICA)² membuka pabrik furniture dengan bekerjasama dengan ADRF Dream Centre. Tidak hanya itu, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 juga melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan LG Electronics Service Indonesia³ dalam pemberian upaya penanganan anak jalanan. LG memberi dukungan pada Panti Sosial Bina

¹ Mengatasi Remaja Bermasalah DKI, Dinsos akan Kerjasama dengan Korea. (diakses pada 26 Mei 2019 melalui website

<https://www.kompasiana.com/dinsosdki/5c3fddd443322f76f0006aab/mengatasi-remaja-bermasalah-dki-dinsos-akan-kerjasama-dengan-korea>

² Dinsos DKI dan KOICA Membuka Pabrik Furniture. Diakses pada 26 Mei 2019

melalui website <https://www.kompasiana.com/dinsosdki/5b85f08012ae942a342b0162/dinsos-dki-dan-koica-membuka-pabrik-furniture>

³ Panti Remaja Dinsos Kerjasama Penanganan Anjal dengan LG Electronics Service. Diakses pada 26 Mei 2019 melalui website

<https://www.kompasiana.com/dinsosdki/5b83be776ddcae75561bcf26/panti-remaja-dinsos-kerjasama-penanganan-anjal-dengan-lg-electronics-service>

Remaja Taruna Jaya 1 pada kelas furniture dengan pemberian mesin baru, bahan ajar hingga pemasangan alat-alat pabrik kayu bersama ADRF Dream Center. Selain itu, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 juga melakukan kerjasama dengan *Korea Trade – Investment Promotion Agency* (KOTRA) melalui CSR⁴. Salah satu bentuk kerjasamanya ialah melakukan pelatihan memasak korea. Remaja bermasalah sosial yang dibina oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 diberikan pelatihan memasak makanan korea sebagaimana yang dikutip melalui kompasiana.com/dinsosdki. Dalam pelajaran tata boga yang melibatkan instruktur memasak dari korea dengan maksud mempelajari memasaknya seperti orang korea.

Berdasarkan wawancara lisan yang dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2014-2016, panti-panti sosial di Dinas Sosial pun turut andil dalam mengundang instruktur atau pelatih untuk datang ke panti untuk memberi pelatihan kepada Warga Binaan Sosial (WBS). Pelatihan yang diberikan selama selama tujuh bulan hingga setahun atau dapat disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Setelah anak-anak mengikuti pembinaan di Panti, mereka akan mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Mereka yang memiliki sertifikat berhak disalurkan ke bursa tenaga kerja.

Para anak jalanan yang sudah diberi pelatihan dan pembinaan di panti sosial ditemukan beberapa yang kembali lagi ke jalanan untuk menjadi gelandangan dan

⁴ Remaja Bermasalah Sosial DKI Jakarta Dilatih Masak Makanan Korea. Diakses pada 26 Mei 2019 melalui website <https://www.kompasiana.com/dinsosdki/5bee2e2dc112fe25bd0d6e57/remaja-bermasalah-sosial-dki-dilatih-masak-makanan-korea>

pengemis. Tidak hanya itu, anak jalanan yang dibina di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang sesekali kembali ke rumah saat pembinaan pun mengakui bahwa sering kali terbawa suasana lingkungan pertemanan di rumah sehingga tidak ingin kembali melakukan pembinaan ke Panti. Bahkan, beberapa dari mereka yang sudah diberikan modal untuk mandiri pun terkadang masih belum bisa untuk mandiri. Hal ini terjadi karena masih kurangnya menanamkan jiwa kemandirian agar mampu mencapai penghidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara lisan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2014-2016, hal ini disebabkan oleh masalah lingkungan sosialnya. Disini dibutuhkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta menjaga lingkungan sehat tersebut agar para anak jalanan tidak lagi kembali menjadi pengemis dan menggelandang.

Berdasarkan berita yang dikutip melalui Sindonews.com⁵, Dinas Sosial DKI Jakarta telah berhasil menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 45% sebagai wujud terealisasinya kebijakan pemerintah dalam menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Ibukota. Dari data tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dampak intervensi yang diberikan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada keberlanjutan penghidupan anak jalanan dan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memberikan intervensi oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

⁵ Dinsos DKI Sebut Tahun 2017 Jumlah PMKS Turun 45 Persen Diakses pada 26 Mei 2019 melalui website bit.ly/BeritaSindo

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat anak jalanan yang sudah diberikan intervensi oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 kembali lagi ke jalanan.
2. Masih terdapat anak jalanan yang belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun sudah diberikan pembinaan.

1.3 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana dampak intervensi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada keberlanjutan penghidupan anak jalanan?
- 2 Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memberikan intervensi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari judul Analisis Dampak Intervensi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 D.K.I. Jakarta pada Keberlanjutan Penghidupan Anak Jalanan, sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak intervensi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada keberlanjutan penghidupan anak jalanan.
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memberikan intervensi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan mengembangkan teori-teori ilmu pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum dan berperan

sebagai sumbangsih dalam pengaplikasian Ilmu Administrasi Publik serta mampu menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan dampak intervensi pemberdayaan pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 Provinsi DKI Jakarta.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis tentang dampak intervensi yang dilakukan Dinas Sosial DKI Jakarta pada keberlanjutan kehidupan anak jalanan, serta faktor apa yang menjadi pendukung ataupun penghambat dalam melakukan intervensi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

b. Bagi Fakultas

Menambah literatur dan informasi sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang selanjutnya berkaitan dengan dampak intervensi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada keberlanjutan kehidupan anak jalanan, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam melakukan intervensi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

c. Bagi Pemerintah Kota DKI Jakarta

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan khususnya terkait dampak intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta pada keberlanjutan penghidupan anak jalanan dan faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam melakukan intervensi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

1.6 Pendekatan Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Syafiie, 2010, p. 24) mendefinisikan administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Nigro bersaudara (Syafiie, 2010, p. 24) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta hubungan di antara mereka. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Chandler dan Plano (Keban, 2008, p. 3) mendefinisikan administrasi publik merupakan suatu proses atau kegiatan dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Chandler dan Plano menekankan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengatur keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan publik untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Dimock, Dimock, & Fox (Keban, 2008, p. 3) mendefinisikan administrasi publik ialah produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Dimock, Dimock, & Fox melihat bahwa administrasi publik mengarah pada *New Public Manajemen* yang merupakan suatu kegiatan yang serupa dengan bisnis dalam menghasilkan pelayanan publik berupa barang dan jasa dan melihat masyarakat sebagai pelanggan, bukan warga negara.

Pfiffner dan Presthus (Syafiie, 2010, pp. 23–24) mendefinisikan administrasi publik meliputi (1) implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, (3) secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud

terhadap usaha sejumlah orang. Administrasi publik menurut Pfiffner dan Presthus menekankan pada implementasi, koordinasi, dan proses kebijaksanaan pemerintah terhadap kegiatan atau tindakan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik yang telah disebutkan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu kegiatan dalam menghasilkan barang atau jasa serta melihat masyarakat sebagai pelanggan, bukan warga negara. Administrasi publik ini merupakan seni dan ilmu yang mengatur permasalahan publik, dimana keputusan-keputusan dalam kebijakan yang dibuat berdasarkan asas kepentingan publik.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (Keban, 2008, p. 31) mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara seperti diuraikan berikut ini.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokohnya ialah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow (Keban, 2008, p. 32) mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan perumusan kebijakan.

Implikasi dari paradigma tersebut ialah bahwa administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya menekankan aspek *locus* saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi *focus* atau metodenya apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Paradigma ini memiliki perbedaan dengan Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi, yaitu terletak pada fokus dan lokus dari administrasi publik. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi menjelaskan bahwa fokus dari administrasi publik ialah fungsi-fungsi atau prinsip-prinsip dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, koordinasi, pelaporan dan penganggaran, sedangkan untuk lokus dalam paradigmanya ini ialah abstrak karena beranggapan bahwa fokus tersebut dapat dilakukan dimana saja, termasuk di organisasi pemerintah.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Dalam konteks ini administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi

pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* di satu pihak dengan anggapan akan *value-laden politics* di lain pihak. John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga merupakan teori politik, sehingga muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya kabur atau abstrak karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Prinsip-prinsip administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik. Administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Fokus yang ingin dikembangkan pada paradigam ini ialah telah diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam dunia administrasi publik, sebab lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma keempat ini memiliki persamaan dengan paradigma kedua, yaitu sama-sama memiliki fokus yang jelas namun fokus dalam paradigma keempat dan kedua adalah berbeda. Fokus dalam paradigma keempat ini adalah perilaku

organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, dan sebagainya. Lokus dalam paradigma ini sama halnya dengan paradigma kedua, yaitu abstrak atau kabur karena beranggapan bahwa fokus tersebut dapat dilakukan di dunia bisnis dan di administrasi publik.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Paradigma ke-5 berbeda dengan paradigma-paradigma sebelumnya, dimana paradigma ini sudah memiliki *Fokus* dan Lokus administrasi publik yang jelas.

Selain paradigma yang telah disebutkan diatas, terdapat tiga paradigma lainnya yang dijelaskan menurut Keban (2008), diantaranya paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS) yang sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Pada paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang dicetuskan oleh Woodrow Wilson menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari politik. Pada paradigma ini Wilson sejalan dengan jiwa atau semangat bisnis dimana menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis sehingga mereka harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbang keanggotaan atau kedudukan dalam suatu partai politik. Paradigma ini didukung oleh Max Weber, ia berpendapat ketika

masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks, maka dibutuhkan suatu institusi yang rasional yaitu birokrasi dengan penerapan perilaku yang impersonal atau saklek sehingga tercipta profesionalitas. Dalam perkembangan paradigma OPA ini menghadapi masalah, misalnya Weber yakin bahwa sosok organisasi birokrasi sangat ideal, padahal dalam perkembangannya bisa berubah sifatnya menjadi sangat kaku, bertele-tele, dan penuh *red tape*. Pada paradigma ini dapat dilihat untuk membangun birokrasi yang diperlukan profesionalitas penggunaan keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan dan standarisasi secara tegas, sikap yang netral dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektivitas.

Paradigma yang kedua ialah *New Public Management* (NPM) didasari pada teori pasar dan budaya bisnis dalam organisasi publik menurut Vigoda (Keban, 2008). Sedangkan menurut Hope (Keban, 2008) pada paradigma ini muncul karena adanya krisis fiskal pada tahun 1970 dan 1980 serta adanya keluhan bahwa sektor publik terlalu besar, boros, efisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah. Menurut Rosenbloom & Kravchuck (Keban, 2008), pada paradigma *New Public Management* dapat dikatakan bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan daripada menjalankan sendiri, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan pada budaya organisasi yang lebih fleksibel, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil, inovatif, ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input.

Paradigma selanjutnya adalah paradigma *New Public Service*. Pada paradigma ini menjelaskan birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan serta mengutamakan kepentingan umum dan mengikutsertakan masyarakat untuk berpikir strategis dan bertindak demokratis. Paradigma ini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakatnya. Pada paradigma *New Public Service* mempunyai implikasi pada peran pemerintah yang bersifat mengarahkan masyarakat melalui fungsi-fungsi yang bersifat langsung dan mengendalikan seperti fungsi pengaturan atau regulasi, kemudian fungsi pemberian layanan, serta menetapkan aturan dan insentif.

Penelitian ini mengarah pada paradigma ke lima. Paradigma kelima ini mempunyai fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya adalah dampak intervensi pada keberlanjutan penghidupan anak jalanan, dan lokusnya ialah Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1. Selain itu, penelitian ini lebih cenderung pada paradigma yang dijelaskan menurut Keban, yaitu paradigma *New Public Management*. Hal ini dikarenakan pemerintah dituntut untuk mampu mandiri, menumbuhkan sikap dan perilaku yang kreatif, mampu memanfaatkan peluang dan kreativitas, inovatif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi pengaturan. Dengan adanya kebijakan untuk mengatur keberadaan anak jalanan di jalan. Kegiatan pemberdayaan ini juga bukan sebuah hegemoni, namun untuk menjalankan fungsi

pemerintah sebagai fungsi pengaturan, serta upaya memberdayakan para anak jalanan agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

1.6.3 *New Public Management*

New Public Management (NPM) merupakan penggunaan pendekatan sektor swasta dan bisnis ke ranah sektor publik. *NPM* menekankan penggunaan mekanisme dan terminology pasar (*market based*) yang memandang hubungan antara instansi publik dengan masyarakat selayaknya transaksi antara penjual dan pembeli (masyarakat sebagai penerima manfaat ditempatkan sebagai konsumen). Gambaran *NPM* tertuang dalam sepuluh prinsip *Reinventing Government* karya Osborne dan Gaebler. Menurut Osborne dan Gaebler dalam (Nashar, 2019, p. 2) *Reinventing Government* atau mewirausahakan birokrasi berarti mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik.

Reinventing Government (pemerintah bergaya swasta) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengadopsi “*value entrepreneurship*” dengan tujuan menumbuhkan sikap dan perilaku yang inovatif dan adaptif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada konsep ini, Pemerintah dituntut untuk mandiri agar produktivitas dan efisiensi kerja dapat optimal sehingga dapat dikatakan cara ini disebut paling efisien dan efektif untuk menghindari bangkrutnya suatu birokrasi. Pemerintahan yang menerapkan gaya wirausaha merupakan upaya berfikir strategis sehingga dapat memperluas perspektif dan mampu memanfaatkan kreativitas, menghasilkan ide-ide cemerlang. Inti dari prinsip *Reinventing Government* ialah sebagai berikut.

1. *Catalytic government: steering rather than rowing.* Pemerintahan berfungsi memisahkan penetapan keputusan dengan peran pemberian pelayanan.
2. *Community owned government: empowering rather than serving.* Pemerintahan harus bekerjasama dengan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memberdayakan masyarakat untuk mengendalikan lingkungan dan kebutuhan mereka.
3. *Competitive government: injecting competition into service delivery.* Pemerintahan yang kompetitif dimana menyuntikkan persaingan dalam pemberian pelayanan.
4. *Mission driven government: transforming rule driven organizations.* Pemerintahan yang digerakkan oleh tujuan dimana memiliki beberapa keunggulan, diantaranya lebih efisien, efektifm inovatif, fleksibel, dan memiliki semangat tinggi untuk mewujudkan tujuannya.
5. *Result oriented government: funding outcome, not inputs.* Pemerintahan lebih berorientasi pada hasil dimana segala sesuatu diperhitungkan matang-matang agar tidak boros.
6. *Customer-driven: meeting the needs of customer, not the bureaucracy.* Pemerintah menciptakan sistem pelayanan yang ramah pelanggan atau *customer centric* dimana pemerintah sadar pada kebutuhan dan keinginan pengguna pelayanan.
7. *Enterprising government: earning rather than spending.* Pemerintahan berusaha selalu meningkatkan pendapatan sehingga bisa ditabung untuk menambah investasi dengan cara lebih berorientasi pada keuntungan.

8. *Anticipatory government: prevention rather than cure.* Pemerintahan harus lebih mencegah daripada memberikan reaksi, memberikan pandangan kedepan dalam proses pembuatan keputusan, mengembangkan arah dan tujuan yang lebih strategis.
9. *Decentralized government: from hierarchy to participation and team work.* Pemerintahan lebih mengedepankan desentralisasi karena dirasa lebih mampu mengembangkan kemampuannya.
10. *Market oriented government: leveraging change through the market.* Pemerintahan berorientasi pasar yang sarannya Menyusun dan menstruktur pasar dengan mendesain ulang peraturan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Konsep *entrepreneurship* ini harus dimasukkan dalam pola pikir para penyelenggara negara sehingga mampu merubah orientasi aparatur publik agar lebih kreatif, inovatif, antisipatif, dan mampu menangkap peluang. Menurut Osborne dan Gaebler dalam (Nashar, 2019, p. 5) kinerja organisasi pemerintah dapat optimal dalam mengelola sumber dayanya apabila mengikuti prinsip-prinsip yang dianut organisasi bisnis dengan baik. Oleh karena itu, organisasi publik harus mempunyai semangat kewirausahaan sehingga mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik agar mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dengan baik. Akan tetapi, meskipun organisasi publik menganut prinsip kewirausahaan, pemerintahan bekerja tidak berdasarkan *profit oriented*.

1.6.4 Manajemen Publik

Mary Parker (Keban, 2008, p. 91) mendefinisikan manajemen merupakan sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain. Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting. Pertama, manajemen merupakan suatu proses kerja sama yang mengandalkan sinergisme. Kedua, proses tersebut dilakukan antara orang-orang, yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pemimpin. Ketiga, kerja sama tersebut dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji keterandalannya. Dalam mendefinisikan manajemen, Mary Parker menekankan bahwa di dalam manajemen terdapat kerja sama yang dipimpin oleh seorang pemimpin dan dalam pelaksanaannya didasarkan oleh suatu prinsip untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Harold Koontz dan Cyril O' Donnel (Amirullah; Budiyono, 2004, p. 7) mendefinisikan manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. George Terry (Syafiie, 2010, p. 49) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Manajemen publik mempunyai warna pengabdian masyarakat yang lebih menonjol.

Overman (Keban, 2008, pp. 92–93) mendefinisikan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan

merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, phisik, informasi dan politik di sisi lain. OTT, Hyde dan Shafritz (Pasolong, 2013, p. 83) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara lebih jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia.

Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik. Pendapat dari OTT, Hyde dan Shafrits mengenai definisi dari manajemen publik hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Overman sebelumnya, yaitu dimana manajemen publik merupakan proses menggerakkan sumber daya sesuai dengan apa yang diperintahkan kebijakan publik, namun yang sedikit ditekankan dalam hal ini ialah bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih satu sama lain.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen publik yang telah disebutkan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai perintah kebijakan publik dengan cara melalui proses *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* yang dipimpin oleh seorang pemimpin.

1.6.5 Manajemen Perubahan

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (2011) dalam Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik serta mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Menurut J. Galpin (Paryadi, 2016) manajemen perubahan adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan dan mendukung perubahan dalam suatu organisasi. Sedangkan Lance A. Berger dkk. (Paryadi, 2016) menyatakan bahwa manajemen perubahan adalah proses mensejajarkan/menyesuaikan perusahaan dengan pangsa pasar agar lebih responsif dan lebih efektif dengan para pesaing. Menurut Winardi (Sugandi, 2013) manajemen perubahan merupakan proses yang terus menerus untuk melayani setiap kebutuhan akan perubahan dan perubahan selalu memunculkan kekhawatiran serta harapan. Salah satu sasaran manajemen perubahan merupakan upaya agar proses transformasi dapat berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan yang seminimal mungkin.

Menurut Winardi (Sugandi, 2013) perubahan dapat menimbulkan dampak negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif bagi organisasi. Perubahan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan organisasi dengan bersikap proaktif terhadap perubahan yaitu dengan satu-satunya cara untuk menguasai masa depan organisasi. Menurut Winardi (Sugandi, 2013) perubahan dapat menimbulkan

dampak negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif bagi organisasi. Perubahan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan organisasi dengan bersikap proaktif terhadap perubahan yaitu dengan satu-satunya cara untuk menguasai masa depan organisasi. Perubahan struktural internal organisasi dan pasar yang sering berakar pada perubahan yang lebih luas dalam masyarakat, ekonomi dan teknologi.

Menurut Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V. dalam (Heri Maulana Sidik, 2008, pp. 3–6) menyatakan bahwa manajemen mempunyai lima unsur (5M) yakni *Man, Money, Material, Machines, dan Methods*. Berikut merupakan penjelasannya.

1. *Man*: Keterlibatan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, spiritual, sosial, dan kecerdasan yang memiliki peranan, pikiran harapan serta gagasan sebagai penggerak.
2. *Money*: Memiliki makna uang dan anggaran. Kualitas keuangan yang baik memberikan dampak terhadap stabilitas baik itu kepemimpinan, organisasi, hingga masyarakat. Sebaliknya, semakin buruk sistem keuangannya maka akan semakin mendekati dengan kehancuran.
3. *Material*: Bahan atau alat yang dibutuhkan untuk menunjang dalam membuat sesuatu.
4. *Machine*: Mesin kerja yang digunakan untuk mengerjakan proses produksi.
5. *Methods*: Prosedur atau cara kerja yang digunakan dan ditetapkan oleh sebuah organisasi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan menurut Sugandi (2013) adalah (1) teknologi, (2) kondisi ekonomi, (3) kompetisi global, (4) adanya perubahan sosial dan demografik, (5) tantangan-tantangan internal. Berdasarkan pengertian para ahli yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen perubahan merupakan proses menyesuaikan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan-kesulitan seminimal mungkin.

1.6.6 Perubahan Sosial

Menurut Kingsley Davis (Kasnawi and Asang, 2012) mengartikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cita-cita hidup yang disebabkan oleh faktor perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Pengertian perubahan sosial menurut Selo Soemardjan (Kasnawi and Asang, 2012) adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perubahan sosial yang didefinisikan Koenig (Marius, 2006) sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, termasuk dalam terminologi urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Menurut Gillin dan Gillin (Marius, 2006) mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi

penduduk, ideologi maupun karena terdapat difusi ataupun penemuan-penemuan baru yang ada dalam masyarakat.

Menurut Henslin, 2007; dan PB Borton dan CL Hunt, 1992; Soerjono Soekamto, 2000 (Djazifah, 2012) dapat dijumpai bentuk-bentuk perubahan sosial, sebagai berikut.

1. Perubahan Sosial secara Lambat

Seringkali dikenal dengan evolusi, dimana memerlukan waktu lama. Ciri perubahan secara evolusi tidak terjadi di masyarakat, berlangsung sangat lambat dan tidak menyebabkan disintegrasi kehidupan. Perubahan secara evolusi ini terjadi dengan sendirinya atau alami, tanpa rencana.

2. Perubahan Sosial secara Cepat

Sering disebut dengan revolusi. Perubahan mendasar bagi kehidupan masyarakat, dan sering menimbulkan disintegrasi kehidupan.

3. Perubahan Sosial Kecil

Terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh pada aspek kehidupan.

4. Perubahan Sosial Besar

Perubahan membawa pengaruh besar dalam aspek kehidupan, serta menimbulkan perubahan. Seperti terjadinya proses modernisasi – industrialisasi.

5. Perubahan Sosial yang Direncanakan (Dikehendaki)

Perubahan yang sudah direncanakan oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di masyarakat (*agent of change*). Pihak ini sudah mendapat kepercayaan sebagai pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan dinamakan rekayasa sosial atau perencanaan sosial.

6. Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan (Tidak Dikehendaki)

Perubahan sosial yang berlangsung tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Biasanya perubahan yang tidak direncanakan bisa saja terjadi perubahan yang ternyata diharapkan dan diterima oleh kalangan masyarakat.

Berdasarkan pengertian para ahli yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Termasuk di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Menurut penelitian (Marius, 2006) terkait perubahan sosial, pada penelitian ini mengaitkan antara perubahan sosial dengan adanya urbanisasi, karena urbanisasi merupakan bagian serta sebab dan akibat dari adanya perubahan sosial, seperti karena adanya ketidakmerataan pembangunan yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat, serta terdapat ketidakadilan. Adanya fokus mampu menciptakan permasalahan di kota dan di desa. Untuk mencegah permasalahan ini ialah dengan dilakukannya pemerataan pembangunan dimana penyuluhan memiliki peran besar didalam proses perubahan sosial. Penyuluhan mempunyai peran untuk mengatur, serta menstabilkan perubahan sosial yang terjadi. Penyuluhan juga mempunyai peran strategis, seperti

sebagai instrumen dalam pemberdayaan sosial, alat memotivasi, instrumen penyadaran, instrumen tumbuhnya toleransi terhadap perubahan, dan lain sebagainya.

1.6.7 Teori Dampak

Dampak sosial dalam Galisteo Consulting Group (2002) tercermin pada perubahan dimana cara suatu komunitas diatur. Menurut Komite Antar-organisasi tentang Pedoman dan Prinsip untuk Penilaian Sosial (United Nations Public Administration Network: Centre for Good Governance, 2006) mendefinisikan dampak sosial sebagai konsekuensi terhadap populasi manusia dari setiap tindakan publik atau pribadi yang mengubah cara hidup manusia, bekerja, bermain, berhubungan satu sama lain. Dampak sosial juga mencakup perubahan cara hidup masyarakat, budaya mereka, komunitas, sistem politik, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, hak pribadi dan properti mereka, serta ketakutan dan aspirasi mereka (United Nations Public Administration Network: Centre for Good Governance, 2006). Dampak budaya melibatkan perubahan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan individu yang membimbing dan merasionalisasi kesadaran nalar diri sendiri dan masyarakat mereka (Trend, 2012).

Dampak dari proyek-proyek menurut *United Nations Public Administration Network: Centre for Good Governance* (2006) bisa menjadi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut *National Research Council* (Galisteo Consulting Group, 2002) dampak umumnya akan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Apabila dijabarkan maka penjelasan ketiga kategori dampak menurut Galisteo Consulting Group (2002) ialah sebagai berikut:

1. **Dampak Sosial** merupakan kategori terluas. Dampak-dampak ini umumnya tercermin pada perubahan dimana cara suatu komunitas diatur. Hal ini dapat mencakup struktur organisasi seperti pola tempat tinggal, komposisi etnis suatu lingkungan, atau jumlah dan jenis organisasi masyarakat yang aktif pada waktu tertentu. Keterlibatan masyarakat merupakan kunci untuk membangun gambaran akurat tentang hubungan sosial dan jaringan.
2. **Dampak Budaya** merupakan beberapa dari yang paling sulit untuk dihadapi karena paling sulit untuk diukur. Mereka umumnya diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi partisipan di masyarakat, atau melalui penelitian dalam sumber-sumber sekunder seperti sejarah lokal. Penting untuk dicatat di awal bahwa 'dampak budaya' dalam konteks Dampak Penilaian Sosial berarti jauh lebih dari sumber daya bersejarah dan/atau arkeologis yang teridentifikasi. Budaya komunitas umumnya mencakup semua kegiatan yang dianggap normal dan konvensional oleh komunitas itu, dan nilai-nilai (baik positif maupun negatif) yang ditempatkan pada aktivitas tersebut. Perubahan dalam aktivitas yang dinilai akan berdampak pada budaya. Tugas analisis Dampak Penilaian Sosial adalah menentukan perilaku mana yang bernilai positif dan selanjutnya, apa yang mungkin mengubah perilaku itu dengan cara negatif.
3. **Dampak Ekonomi** secara umum didefinisikan sebagai perubahan nilai pasar dari beberapa proses, aset, atau sumber daya karena keputusan atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan; perubahan indikator ekonomi dasar seperti tingkat pengangguran atau ada atau tidaknya sektor industri utama. Indikator

yang terkait dengan dampak ini akan mencakup nilai properti, tingkat aktivitas bisnis, dan kualitas atau kuantitas pekerjaan dalam suatu komunitas.

1.6.8 Intervensi

Intervensi sosial merupakan kegiatan keterlibatan seseorang atau lembaga/negara untuk merubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan cara dan strategi tertentu untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapinya. Tujuan utama dari bantuan yang diberikan ialah untuk memperbaiki fungsi sosial dan peran sosial (Iskandar, 2017, p. 2). Asumsi yang dibangun apabila fungsi sosial dapat berjalan dengan baik, akan berimplikasi pada stabilitas kondisi lainnya. Intervensi sosial tersebut dapat dijadikan pemicu terhadap pencapaian fungsi-fungsi lainnya yang mungkin selama ini mengalami hambatan atau benturan dengan masalah lainnya (Iskandar, 2017, p. 2). Intervensi sosial Hardjomarsono (2014, p. 4) adalah tindakan yang bertujuan untuk membantu orang perorangan atau kelompok atau keluarga atau komunitas dalam konteks kehidupan sosial mereka.

Johnson dalam (Hardjomarsono, 2014, p. 4) menyatakan (1) tindakan spesifik yang dikerjakan oleh seorang pelaku intervensi, yang terkait dengan upaya untuk menimbulkan perubahan. (2) Sebuah alat yang digunakan pelaku intervensi untuk memecahkan masalah-masalah dengan cara yang rasional. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui intervensi ialah membantu klien mengalami perubahan yang diinginkan. Jika pada awal hubungan intervensi tersebut klien mengalami gangguan atau dalam keadaan tidak dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang

selayaknya di lingkungan sosialnya, maka pada akhir intervensi diharapkan klien mengalami perubahan berikut:

1. Dapat memperoleh kembali keberfungsian-sosialnya selaku anggota masyarakat yang layak;
2. Memperoleh kemampuan untuk mengatasi gangguan yang dihadapi;
3. Meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupannya dengan teknik penyelesaian masalah yang lebih baik;
4. Lebih mampu menjalankan peranan-peranan barunya sesuai dengan perkembangan dirinya sehingga gangguan serupa dapat dicegah supaya tidak berulang lagi.

Memperhatikan betapa luasnya permasalahan yang mungkin dihadapi oleh orang perorangan, keluarga, kelompok, atau komunitas, upaya intervensi dalam konteks sosial dapat dipilahkan sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan untuk memulihkan keberfungsian-sosial seseorang, atau orang-orang, keluarga, kelompok atau komunitas sebagai warga keluarga, warga kelompok atau komunitas yang layak (bersifat kuratif dan korektif).
2. Juga belum mencakup kegiatan lain-lainnya untuk mengatasi atau mencegah timbulnya masalah-masalah (bersifat preventif);
3. Mencapai tujuan-tujuan perbaikan sosial (bersifat promotif);
4. Membantu atau mendorong klien untuk mengalami perkembangan yang diinginkan (pengembangan atau developmental).

Terdapat beberapa metode atau praktik intervensi yang lazim digunakan untuk membantu, diantaranya:

1. **Praktik Mikro**, memusatkan perhatiannya pada pelayanan langsung kepada orang perorangan berdasarkan pelayanan kasus demi kasus. Biasanya dilaksanakan di badan intervensi klinis.
2. **Praktik Mezzo**, ditujukan untuk pemberian bantuan bagi keluarga dan kelompok kecil. Kegiatan penting pada jenjang ini mencakup memberikan layanan komunikasi, mediasi, bernegosiasi, mendidik, dan mengajak orang-orang bertemu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi.
3. **Praktik Makro**, diarahkan untuk mendatangkan perbaikan dan perubahan-perubahan dalam komunitas. Kegiatan-kegiatan semacam ini meliputi beberapa tipe intervensi seperti aksi politik, pembangunan masyarakat, gerakan pendidikan masyarakat, administrasi badan sosial yang mempunyai layanan yang luas dan badan-badan kesejahteraan publik lainnya. Menurut Skidmore dalam Hardjomarsono (2014: 10) praktik makro dinyatakan sebagai pendekatan antar kelompok untuk menghadapi dan mengatasi patologi sosial.

Penilaian dampak sosial (*Social Intervention Assessment*) adalah proses menganalisis dampak intervensi publik/pemerintah pada aspek sosial lingkungan manusia (United Nations Public Administration Network: Centre for Good Governance, 2006). Aspek-aspek yang dapat ditinjau apabila melakukan proses menganalisis dampak intervensi publik atau pemerintah pada aspek sosial lingkungan manusia ialah sebagai berikut:

- a) Cara orang mengatasi kehidupan melalui ekonomi, sistem sosial, dan nilai-nilai budaya mereka.

- b) Cara orang menggunakan lingkungan alam, untuk penghidupan, rekreasi, kegiatan spiritual, kegiatan budaya, dan sebagainya.
- c) Cara orang menggunakan lingkungan untuk tempat berteduh, mencari penghidupan, industri, ibadah, rekreasi, berkumpul bersama, dll.
- d) Komunitas Organisasi, lembaga dan kepercayaan sosial dan budaya; Pelestarian identitas komunitas; Seni, musik, tari, seni bahasa, kerajinan; dan aspek budaya ekspresif lainnya.
- e) Nilai-nilai dan kepercayaan kelompok tentang cara-cara yang tepat untuk hidup, hubungan keluarga dan ekstra-keluarga, hubungan status, sarana berekspresi, dan ekspresi komunitas lainnya.
- f) Karakter estetika dan budaya dari suatu komunitas atau lingkungan — suasananya.

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu fungsi yang pemerintah miliki, yaitu fungsi pengaturan. Adanya fungsi ini kegiatan pemberdayaan bukan berarti para anak jalanan yang berkeliaran di jalanan itu dipaksa untuk berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan di jalanan, akan tetapi pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mengatur ketertiban. Bagi para anak jalanan yang terjaring dalam proses penertiban, kemudian akan dilakukan pemberdayaan yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukannya berdasarkan kemauan dan kebutuhan mereka, upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pun akan sia-sia, karena anak jalanan tersebut akan kembali malas-malasan tanpa ada motivasi yang kuat untuk berdaya saing.

Menurut penelitian Lusk (1989) dengan judul *Street Children Programs in Latin America* menjelaskan sebagian besar anak jalanan di Amerika Latin melakukan kontak rutin dengan keluarga mereka dan sebagian besar berada di lingkungan jalan sebagai pekerja untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Sebagian kecil minoritas adalah pemuda yang terlantar atau melarikan diri yang kehilangan kontak dengan keluarga mereka dan disosialisasikan di jalan-jalan. Diperlukan program-program rehabilitasi dan penjangkauan bagi anak-anak yang telah memutuskan hubungan mereka dengan lembaga-lembaga masyarakat dan program-program pencegahan akan membantu mereka yang berada dalam risiko oleh kondisi sosial ekonomi keluarga mereka. Upaya untuk menghadapi masalah sosial ini di Amerika Latin akan paling berhasil ketika memberikan dukungan sosial dan ekonomi untuk mempertahankan otonomi dan integritas keluarga.

Dalam kasus perdagangan bebas, sebagaimana yang tertulis pada jurnal *Free Trade Intervention and Political-Economic Intervention on Global Business Environment: Indonesian Perspective* (Satryo, 2018) bahwa intervensi dibutuhkan sebagai penyeimbang serta melawan perdagangan bebas di ekonomi yang tidak stabil sehingga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk melawan ketidaksiapan teknologi, meningkatkan efektivitas pasar kerja, serta dalam menghadapi isu keamanan nasional. Pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi melalui peraturan pemerintah, pajak, atau subsidi yang secara langsung melalui produk atau jasa sebagaimana yang telah dijelaskan pada jurnal dengan judul *Market Efficiency and Government Intervention Revisited: What Do Recent Evidence Tell Us* (Ajefu and Barde, 2015).

1.6.9 Keberlanjutan Penghidupan

Menurut Saragih (2007) makna kata *livelihood* meliputi modal (alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik) serta aktivitas dimana aturan dan norma sosial yang mengatur dimediasi oleh kelembagaan yang secara bersama mendikte hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga. Dalam literatur Wijayanti, Baiquni, dan Harini (2016), aset penghidupan merupakan segala sesuatu yang berharga atau merupakan sekumpulan modal yang digunakan melangsungkan penghidupan. Aset penghidupan terdiri dari lima modal, yaitu modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), modal alam (*natural capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal finansial (*financial capital*). Aktivitas dalam keberlanjutan penghidupan merupakan strategi penghidupan berdasarkan prioritas dan adanya kesempatan dalam menggunakan kemampuan atau aset yang tersedia untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan. Strategi penghidupan menggambarkan upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencapai penghidupan yang memadai. Strategi penghidupan berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola atau mengkombinasikan aset penghidupan yang tersedia atau dimiliki, menyikapi perubahan yang terjadi, dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan (Wijayanti, Baiquni and Harini, 2016).

Prinsip berkelanjutan penghidupan yang dikembangkan oleh UNDP (Martopo, Hardiman and Subaryanto, 2012, p. 413) yaitu manusia sebagai fokus utama pembangunan (*people-centered*), memahami penghidupan secara menyeluruh (*holistic*), merespon dinamika penghidupan masyarakat (*dynamic*), mengoptimalkan potensi masyarakat (*building on strengths*), menelaraskan

kebijakan makro dan mikro (*macro-micro links*), mewujudkan keberlanjutan penghidupan (*sustainability*). Penghidupan sering kali dikaitkan dengan kata berkelanjutan. Keberlanjutan terjadi dengan prasyarat:

- a. Penghidupan masyarakat bersifat lentur dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan (*shocks*) dari luar;
- b. Tidak bergantung atau dibuat tergantung pada bantuan dari luar
- c. Mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam; dan
- d. Tidak merugikan atau merusak sumber-sumber penghidupan, atau pilihan-pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain.

Keberlanjutan mempunyai banyak dimensi yang semuanya penting bagi pendekatan *sustainable livelihoods*. Penghidupan dikatakan berkelanjutan apabila:

- a. Elastis dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan dari luar;
- b. Tidak tergantung pada bantuan dan dukungan luar;
- c. Mempertahankan produktivitas jangka panjang sumber daya alam;
- d. Tidak merugikan penghidupan atau mengorbankan pilihan-pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain; dan
- e. Mampu membedakan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi, sosial, institusional, dan infrastruktur dari sistem yang *sustainable*.

Menurut Martopo, Hardiman, dan Subaryanto (2012), prinsip *sustainability* menegaskan pentingnya keberlanjutan dan ketahanan penghidupan masyarakat dalam menghadapi perubahan (*shocks & trends*), terus menerus memperbaharui

penghidupan mereka dalam jangka panjang. Keberlanjutan merupakan inti dari pendekatan ini dan meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

1. Keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), adalah kondisi dimana sumber daya alam kita terjaga dan lestari, dapat mencukupi kebutuhan masa sekarang hingga masa generasi yang akan datang. Intensitas kerusakan sumber daya dan ketersediaan sumber daya merupakan indikator yang berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan (UNDP, 2006, 2007; Bohari, 2008).
2. Keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), adalah kondisi dimana pengeluaran dan pendapatan pada tingkat tertentu dapat terjaga keseimbangannya dalam jangka panjang. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, pendapatan dan pengeluaran, tabungan termasuk dalam indikator keberlanjutan ekonomi (UNDP, 2006, 2007; Thamrin, 2007; Bohari, 2008; Hart, 2006).
3. Keberlanjutan sosial (*social sustainability*), adalah kondisi dimana diskriminasi, keterlantaran, kekerasan dan ketidakadilan dapat diminimalkan, sebaliknya pemerataan, kesetaraan dan keadilan lebih diutamakan dan mendapat dukungan bersama. Tingkat Pendidikan, jumlah penduduk miskin, pemberdayaan masyarakat termasuk indikator yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sosial (UNDP, 2006, 2007; Bohari, 2008; Thamrin, 2007; Santosa, 2009).

4. Keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*), adalah kondisi dimana lembaga-lembaga dan proses penting dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya dalam jangka panjang.
5. Keberlanjutan infrastruktur (*infrastructure sustainability*). Majale (2002 dalam Odindi, 2010) efektifitas penghidupan berkelanjutan didasarkan pada ketersediaan dan aksesibilitas aset layanan. Ketersediaan infrastruktur umum (kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi), kondisi prasarana jalan, sistem air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan mempunyai pengaruh terhadap penghidupan berkelanjutan (UNDP, 2007; Bohari, 2008; Santosa, 2009).

Chambers and Conoway pada literatur *Begging as a Livelihood Pathway of Street Children in Addis Ababa* (Abebe, 2009) melihat penghidupan mencakup dari aset, kegiatan dan hak yang menunjukkan cara manusia mengembangkan sumber daya untuk meningkatkan peluang kehidupan. Berbeda lagi menurut Vincent dan Sorensen yang biasanya menyebutkan bahwa penghidupan dapat dilihat sebagai bagian dari ranah sosial budaya dimana manusia mencari nafkah tidak bisa lepas dari konteks sosial ekonomi yang luas. Menurut Robert Chambers dan Gordon Conway dalam literatur *Sustainable Rural Livelihood: The Path to Fight Poverty* (L., K. S. and Biswas, 2014) menjelaskan mata pencaharian pedesaan dapat didefinisikan sebagai mata pencaharian yang terdiri dari kemampuan, aset (toko, sumber daya, klaim dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana kehidupan: penghidupan keberlanjutan dapat mengatasi dan pulih dari stres dan guncangan, mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan aset, serta menyediakan peluang mata pencaharian berkelanjutan untuk generasi berikutnya;

dan yang menyumbangkan manfaat bersih untuk mata pencaharian lain di tingkat lokal dan global dalam jangka panjang dan pendek.

Dari beberapa literatur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penghidupan merupakan upaya manusia dalam mengembangkan sumber daya untuk mencari nafkah sebagai upaya meningkatkan peluang kehidupan. Penghidupan yang berkelanjutan dapat mengatasi pulihnya dari stres dan guncangan akibat dampak kurang beruntungnya di bidang ekonomi.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Dampak Intervensi

Dampak intervensi merupakan konsekuensi dari setiap tindakan publik atau pribadi yang mengubah cara hidup manusia dimana pemerintah mendapatkan proses kontrol atas kehidupan mereka. Proses memberikan kontrol tersebut sebagai wujud penyeimbangan atau stabilitasi untuk mencapai keberfungsian sosial dengan cara merubah perilaku, pikiran, dan perasaan. Untuk melihat dampak intervensi dapat dibagi menjadi tiga, berikut penjabarannya. (Galisteo Consulting Group, 2002; United Nations Public Administration Network: Centre for Good Governance, 2006; Hardjomarsono, 2014; Ajefu and Barde, 2015; Iskandar, 2017; Satryo, 2018)

1. Dampak Ekonomi. Cara mengatasi kehidupan melalui ekonomi dan mencari pekerjaan. Perubahan indikator ekonomi dasar seperti tingkat pengangguran atau ada atau tidaknya sektor industri utama. Indikator yang terkait dengan dampak ini ialah kualitas dan kuantitas pekerjaan dalam suatu komunitas.

2. Dampak Sosial. Cara mengatasi kehidupan melalui sistem sosial. Tercermin pada perubahan dimana cara suatu komunitas diatur. Hal ini mencakup perubahan pola pikir, perilaku, keterlibatan masyarakat tentang hubungan sosial dan jaringan.
3. Dampak Budaya. Cara mengatasi kehidupan melalui nilai-nilai budaya mereka. Budaya yang dianggap oleh suatu komunitas normal dan konvensional, baik itu positif maupun negatif. Perilaku mana yang bernilai positif yang ditempatkan pada aktivitas tersebut.

1.7.2 Keberlanjutan Penghidupan

Penghidupan merupakan upaya manusia dalam mengembangkan sumber daya untuk mencari nafkah sebagai upaya meningkatkan peluang kehidupan. Penghidupan yang berkelanjutan dapat mengatasi pulihnya dari stres dan guncangan akibat dampak kurang beruntungnya di bidang ekonomi. Prinsip *sustainability* atau keberlanjutan merupakan upaya mempertahankan penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan (*shocks & trends*), mereka harus memperbaharui penghidupannya secara berkelanjutan agar mampu bertahan dalam jangka panjang. (Abebe, 2009; Martopo, Hardiman and Subaryanto, 2012; L., K. S. and Biswas, 2014)

Terdapat beberapa aspek dalam pendekatan keberlanjutan, berikut merupakan penjelasannya (Martopo, Hardiman and Subaryanto, 2012).

1. Keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*). Kondisi dimana mampu mempertahankan kelestarian dan menjaga sumber daya alam sehingga

mampu menghidupi generasi yang akan datang. Salah satu indikator yang mempengaruhi keberlanjutan penghidupan merupakan intensitas kerusakan sumber daya dan ketersediaan sumber daya (UNDP, 2006, 2007; Bohari, 2008).

2. Keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*). Upaya menjaga keseimbangan jangka panjang dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran pada tingkat tertentu. Beberapa indikator yang termasuk dalam keberlanjutan ekonomi merupakan kemampuan dalam menabung, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian hingga kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran. (UNDP, 2006, 2007; Thamrin, 2007; Bohari, 2008; Hart, 2006).
3. Keberlanjutan sosial (*social sustainability*). Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan penghidupan melalui meminimalkan kondisi diskriminasi, ketelantaran, kekerasan hingga ketidakadilan serta mengutamakan keadilan, kesetaraan, pemerataan. Beberapa indikator yang mempengaruhi keberlanjutan sosial merupakan jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat (UNDP, 2006, 2007; Bohari, 2008; Thamrin, 2007; Santosa, 2009).
4. Keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*). Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi suatu lembaga serta proses-proses penting dalam masyarakat agar mampu menjalankan fungsinya dalam jangka panjang.
5. Keberlanjutan infrastruktur (*infrastructure sustainability*). Majale (2002 dalam Odindi, 2010) keberlanjutan penghidupan dapat dilihat dari ketersediaan

infrastruktur umum seperti layanan Kesehatan, pendidikan, hingga transportasi. Tidak hanya itu, dapat pula ditinjau dari kondisi prasarana jalan, sistem air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan yang mempunyai pengaruh terhadap penghidupan berkelanjutan (UNDP, 2007; Bohari, 2008; Santosa, 2009).

Sedangkan menurut Sebastian Saragih, Jonatan Lassa, Afan Ramli (Saragih, 2007) penghidupan dapat dikatakan keberlanjutan apabila,

- a) Elastis, yang dimaksud elastis adalah kemampuan dalam menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga ataupun mendapatkan tekanan dari luar;
- b) Tidak ketergantungan pada bantuan ataupun bantuan dari pihak lain;
- c) Dapat menjaga produktivitas dalam jangka panjang dalam hal sumber daya;
- d) Tidak mengorbankan pilihan-pilihan terkait penghidupan untuk orang lain; dan
- e) Mampu memisahkan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi, sosial, institusional, dan infrastruktur dari sistem yang *sustainable*.

1.7.3 Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan proses transformasi yang dilakukan terus menerus untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan dengan menggunakan pengetahuan, sarana, serta sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi. Kondisi yang diinginkan merupakan kinerja yang lebih baik serta mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Salah satu sasaran manajemen perubahan suatu proses transformasi yang berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan yang seminimal mungkin (Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, 2011; Sugandi, 2013; Paryadi, 2016).

Menurut Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V. dalam (Heri Maulana Sidik, 2008, pp. 3–6) menyatakan bahwa manajemen mempunyai lima unsur (5M) yakni *Man, Money, Material, Machines, dan Methods*. Sedangkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya perubahan menurut Sugandi (2013) adalah (1) teknologi, (2) kondisi ekonomi, (3) kompetisi global, (4) adanya perubahan sosial dan demografik, (5) tantangan-tantangan internal. Dari penjelasan tersebut maka untuk mencari tahu faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan intervensi oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dapat menggunakan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan yang telah disesuaikan dengan penelitian. Berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat adanya perubahan (Heri Maulana Sidik, 2008; Sugandi, 2013).

1. *Man*. Keterlibatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik berupa keterampilan, spiritual, sosial, dan kecerdasan yang memiliki peranan, pikiran harapan serta gagasan sebagai penggerak.
2. *Money*. Memiliki makna uang dan anggaran. Kualitas keuangan yang baik memberikan dampak terhadap stabilitas baik itu kepemimpinan, organisasi, hingga masyarakat. Sebaliknya, semakin buruk sistem keuangannya maka akan semakin mendekati dengan kehancuran.
3. *Machine*. Mesin kerja yang digunakan untuk mengerjakan proses produksi.
4. Teknologi.

1.8 Fenomena Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan dampak intervensi yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dalam menangani Anak Jalanan. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam memberikan intervensi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

Pada fenomena penelitian ini merupakan sebagai pedoman ketika turun ke lapangan, maka fenomena penelitian pada penelitian ini, sebagai berikut.

1. Dampak Intervensi pada Keberlanjutan Penghidupan Anak Jalanan.
 - a) Dampak Ekonomi
 - 1) Cara mengatasi kehidupan melalui ekonomi dan mencari pekerjaan;
 - 2) Kualitas pekerjaan.
 - b) Dampak Sosial
 - 1) Perubahan pada suatu komunitas diatur;
 - 2) Keterlibatan masyarakat terkait hubungan sosial dan jaringan
 - c) Dampak Budaya
 - 1) Melihat perubahan pada perilaku yang semula negatif menjadi positif dari nilai-nilai budaya atau aktivitas yang diterapkan.

Dampak intervensi tersebut dapat dikatakan berkelanjutan pada penghidupannya apabila:

- a) Elastis, yang dimaksud elastis adalah kemampuan dalam menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga ataupun mendapatkan tekanan dari luar;
- b) Tidak tergantung pada bantuan dan dukungan luar;

- c) Mempertahankan produktivitas jangka panjang sumber daya;
 - d) Tidak merugikan penghidupan atau mengorbankan pilihan-pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain; dan
 - e) Mampu membedakan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi, sosial, institusional, dan infrastruktur dari sistem yang *sustainable*.
2. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Memberikan Intervensi Sosial.
- a) *Man*. Keterlibatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik berupa keterampilan, spiritual, sosial, dan kecerdasan yang memiliki peranan, pikiran harapan serta gagasan sebagai penggerak.
 - 1) Kompetensi sumber daya manusia di Panti.
 - b) *Money*. Memiliki makna uang dan anggaran. Kualitas keuangan yang baik memberikan dampak terhadap stabilitas baik itu kepemimpinan, organisasi, hingga masyarakat.
 - 1) Anggaran untuk sarana dan prasarana Panti.
 - c) *Machine*. Mesin kerja yang digunakan untuk mengerjakan proses produksi.
 - 1) Ketersediaan mesin atau alat-alat sebagai prasarana pembelajaran warga binaan sosial.
 - d) Teknologi.
 - 1) Kemampuan warga binaan sosial dalam menggunakan teknologi.

1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014, p. 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah

yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri keilmuan merupakan rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yang dimaksud ialah menggunakan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dinalar oleh manusia, sedangkan empiris merupakan cara yang dapat diamati oleh indera manusia dan sistematis merupakan proses yang dilalui menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1.9.1 Desain Penelitian

Menurut Bungin (2007, p. 67) terdapat 3 (tiga) model dalam format desain penelitian kualitatif yaitu format deskriptif kualitatif, kualitatif verifikatif, dan *grounded theory*. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Desain deskriptif kualitatif menurut (Bungin, 2007, p. 68) merupakan fenomenologis dimana meneliti penampakan atau fenomena sosial, sedangkan postpositivisme merupakan filsafat ilmu yang dikritik karena hanya melihat fenomena sebagai kenyataan nyata sesuai hukum alam. Penelitian yang menggunakan desain deskriptif kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti permasalahan yang memerlukan studi mendalam. Penelitian yang menggunakan desain deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan ataupun meringkas berbagai kondisi dan situasi fenomena sosial yang ada di masyarakat. Penulis memilih menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan mencari tahu informasi secara mendalam fenomena sosial terkait dampak keberlanjutan penghidupan pada anak jalanan setelah diberikan Intervensi oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat ataupun wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Fokus dari penelitian ini adalah dampak intervensi pada anak jalanan, sehingga Lokus atau tempat/wilayah yang diambil ialah di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

1.9.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang diharapkan peneliti mampu memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti, dalam kata lain dapat disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang penelitian kualitatif sehingga informan diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Proses pemilihan informan akan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut Sugiyono (2014, p. 54), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini dianggap informan yang dipilih sebagai orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan atau sebagai pemangku kebijakan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Berikut merupakan penjelasannya.

Pada teknik *purposive sampling* maka membutuhkan karakteristik seseorang yang mengetahui serta melaksanakan kebijakan sehingga mampu memberikan informasi terkait intervensi yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1. Beberapa informan yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* ialah Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, Seksi Pelayanan Sosial Panti Sosial Bina

Remaja Taruna Jaya 1 pada tahun 2020, Satpel Pembinaan Sosial Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada tahun 2020, Tata Usaha Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada tahun 2020. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* dimana membutuhkan rekomendasi yang lain karena dirasa belum memuaskan peneliti. Beberapa informan yang dilakukan dengan teknik *snowball sampling* membutuhkan karakteristik berupa anak jalanan yang sedang dibina di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dan anak jalanan yang sudah selesai melakukan pembinaan dari Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 dan sudah memiliki pekerjaan. Dari karakteristik yang dibutuhkan maka informan yang dibutuhkan ialah warga binaan sosial yang masih mendapatkan pembinaan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada tahun 2020 dan warga binaan sosial Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan pada tahun 2020.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dapat dibagi menjadi dua menurut Marzuki (2000, p. 56) yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber, diamati dan dicatat melalui pertanyaan-pertanyaan dari responden dalam wawancara maupun observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang ada di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Panti Sosial Bina Remaja Tunas Jaya 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder adalah sumber yang tidak langsung, seperti melalui buku, jurnal, literatur, koran, brosur dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

1.9.5 Sumber Data

Dalam Loland dan Lofland (Moleong, 2007, p. 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

b. Sumber Tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

c. Foto

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Menurut Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2014, p. 160), ada dua kategori foto yang dapat yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

d. Data Statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Berikut merupakan penjelasan terkait interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi, dan penelitian kepustakaan.

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur dilakukan bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Pada wawancara terstruktur setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul mencatatnya. Pengumpul wawancara dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan materi lainnya.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pada wawancara tidak terstruktur atau terbuka digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diceritakan oleh responden.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

ingatan. Observasi digunakan apabila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan *non participation observation* atau observasi sederhana dimana peneliti tidak berperan serta, namun hanya mengamati saja. Sedangkan dokumentasi merupakan upaya mencari dokumen berupa artikel di koran, foto, dan laporan yang sesuai dengan permasalahan. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, gambar yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution (Sugiyono, 2014, p. 245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”, namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process*

rather than after process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Terdapat teknik analisis penelitian yang digunakan, yaitu model analisis Spradley, menurut Sugiyono dalam (Wijaya, 2018, pp. 3–4) diantaranya analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Analisis Domain merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dalam menjawab fokus penelitian yang diteliti. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum dan dan belum mendalam dan masih dipermukaan berada di permukaan namun sudah menemukan domain kategori dari situasi sosial yang diteliti. Hubungan teknik analisis domain dengan penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti pada saat awal penelitian dengan melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dampak intervensi yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada keberlanjutan kehidupan anak jalanan. Data yang didapatkan akan dipisah-pisahkan berdasarkan kebutuhan peneliti dan akan melakukan pengamatan pada data tersebut sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan awal.

Analisis taksonomi merupakan kelanjutan analisis domain. Teknik analisis ini menyelidiki peneliti untuk memilih dan mempelajari domain tertentu berdasarkan fokus penelitian. Terdapat domain dan sub domain yang akan diperdalam melalui pengumpulan data di lapangan. Pengamatan lebih terfokus pada masing-masing kategori dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak budaya sehingga gambaran lebih terperinci dari data yang masing-masing sudah

dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis komponensial adalah teknik untuk mencari perbedaan dalam domain atau kesenjangan yang kontras dalam domain yang kemudian dipilah dan dibuatkan kategorisasi yang sesuai. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berbagai pihak yang dinilai memiliki karakteristik yang sesuai sebagai informan penelitian. Kemudian, analisis tema kultural merupakan upaya analisis memahami gejala dari analisis sebelumnya dan mencari kesimpulan. Analisis tema kultural mencari hubungan diantara domain dan hubungan dengan keseluruhan yang kemudian dinyatakan dalam tema yang sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian. Data-data mengenai intervensi yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 ini akan dilihat bagaimana dampaknya pada keberlanjutan penghidupan anak jalanan serta faktor pendukung dan penghambat dari intervensi tersebut.

Selain teknik analisis penelitian juga terdapat proses yang dilakukan dalam menganalisis penelitian. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2014, p. 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2014, p. 246) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada proses ini, peneliti membuat transkrip dari hasil wawancara, kemudian memilah dan memilih data yang kemudian dikelompokkan yang sesuai dengan kepentingan penelitian.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (Sugiyono, 2014, p. 249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini proses penyajian data adalah dengan teks naratif yang mendeskripsikan dampak dari intervensi yang diberikan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 pada keberlanjutan penghidupan anak jalanan serta faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam memberikan intervensi.

3. *Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan/Verifikasi)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2014, p. 252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan pola-pola yang sudah tergambar pada penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai. Kemudian, peneliti mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena yang telah diteliti yang kemudian akan menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru. Penelitian ini mengambil intisari dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.9.8 Kualitas Data

Uji keabsahan dapat dilakukan dengan pendekatan triangulasi dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat statistik. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan terus menerus sampai peneliti puas dan yakin dengan kualitas datanya.

Denzin (Moleong, 2007, p. 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan terus menerus sampai peneliti puas dan yakin dengan kualitas datanya.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi berdasarkan sumber dan metode. Triangulasi berdasarkan sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. Sedangkan triangulasi berdasarkan metode dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.